

**PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : 7 TAHUN : 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

Menimbang :

- a. bahwa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan dana yang memadai ;
- b. bahwa untuk adanya dukungan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan peraturan daerah ;

Mengingat :

1. Undang - undang nomor 14 Tahun 1950. tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA PARAKANMUNCANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA PARAKAN MUNCANG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR ,
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
2. Pemerintah Propinsi adalah pemerintah propinsi Jawa Barat ;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor ;
4. Bupati adalah Bupati Bogor ;

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah desa - desa yang berada di Kabupaten Bogor ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa ;
7. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan Perwakilan yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
8. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
9. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;
10. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistim pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuntungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan ;
11. Pengurusan dan pengelolaan sumber Pendapatan Desa yang selanjutnya disebut pengurusan dan pengolaan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan desa dengan baik ;
12. Pengawasan sumber pendapatan desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dan pengolaan sumber - sumber pendapatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik ;
13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan

jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

14. Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerja sama tanpa adanya unsur paksaan.
15. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur - unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama ;

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli desa ;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. sumbangan dari pihak ketiga ;
 - e. pinjaman desa ;
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. hasil usaha desa ;
 - b. hasil kekayaan desa ;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi ;
 - d. hasil gotong royong ;
 - e. lain - lain pendapatan asli desa yang sah ;
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. bagian dari perolehan pajak Daerah dan retribusi daerah dan Penyisihan Pajak PBB ;

- b. bagian dari perimbangan keuangan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pinjaman desa meliputi :
- a. Bank Pemerintah unit desa ;
 - b. Bank Swasta unit desa
 - c. Pinjaman lain dari badan usaha dibidang moneter.

Pasal 3

Kekayaan desa meliputi :

- a. tanah kas desa ;
- b. pasar desa ;
- c. bangunan milik desa ;
- d. obyek rekreasi yang diurus oleh desa ;
- e. pemandian umum dan obyek wisata yang diurus oleh desa ;
- f. jalan desa ;
- g. pemakaman umum yang diurus oleh desa ;
- h. hutan desa ;
- i. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- j. lain - lain kekayaan milik desa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENAWASAN

Pasal 4

Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat baik penyelenggaraan Pemerintah desa maupun pembangunan desa.

Pasal 5

Tata cara pemungutan dan besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber - sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan pendapatan dari sumber - sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 7

Pengawasan terhadap sumber - sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD, aparat pengawas fungsional, dan atau perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tanah kas desa dilarang dialihkan haknya kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek - proyek pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan desa, disertai kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang sekurang - kurangnya sebanding.

BAB IV

Pasal 9

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan tambahan terhadap sumber pendapatan yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besarnya pendapatan desa yang berasal dari bagian perolehan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 10

Pinjaman desa, usaha desa dengan cara membentuk badan usaha milik desa, sumbangan dari pihak ketiga dan kerja sama dengan pihak ketiga, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang mengatur sumber, pendapatan dan kekayaan desa, pengurusannya dan pengawasannya dan ketentuan - ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal - hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Parakanmuncang

Pada tanggal 2001

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

ttd

MOCH. A N A N

Diundangkan di Parakanmuncang

Pada tanggal 2001

PLH. SEKRETARIS DESA PARAKANMUNCANG

Lembaran Desa Parakamuncang

Tahun. Nomor.